

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan ditujukan guna mensejahterakan rakyat. Di sisi lain, strategi pembangunan yang dirumuskan pemerintah seringkali mengabaikan kondisi lokal keadaan masyarakat miskin. Kemiskinan tetap menjadi fenomena yang *persisten* sepanjang sejarah Indonesia, sebab selama ini pemerintah belum mempunyai strategi yang kuat untuk pengentasan kemiskinan yang baik untuk masyarakat Indonesia.

Kondisi ekonomi masyarakat yang baik, tetapi tidak memberi kesempatan kerja yang cukup, sehingga tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan itu sendiri. Menurut Perpes No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penganggulungan Kemiskinan, Pengertian “Kemiskinan” harus bergeser dari perspektif berbasis hak. Strategi ini menyatakan bahwasanya semua individu, termasuk laki-laki serta perempuan, punya hak yang sama. Kemiskinan yaitu satu keadaan dimana individu ataupun kelompok laki-laki bahkan perempuan tidak terpenuhinya hak dasar mereka dalam mempertahankan dan membangun kehidupan yang layak.

Kemiskinan perlu dikaji karena merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan suatu wilayah, juga dapat menjadi faktor penghambat pembangunan dimasa yang akan datang. Kemiskinan yaitu masalah sosial ekonomi yang terus-menerus di antara penduduk, terutama di negara berkembang. Pada konteks warga negara Indonesia, masalah kemiskinan juga termasuk masalah kemasyarakatan yang perlu terus diselidiki. Bukan hanya sebab masalah kemiskinan sudah ada sejak lama, tetapi juga belum terhapuskan, dan terutama gejalanya terus memburuk seiring dengan krisis multifaset yang dialami bangsa Indonesia saat ini (Alfian, 2000).

Di Indonesia, kemiskinan tidak bisa dituntaskan, karena kecenderungannya yang selalu berkembang. Selain itu, masalah kemiskinan hampir di semua negara mengalaminya. di tahun 2015, 11,22% di Indonesia hidup dalam kemiskinan. Selain itu, di tahun 2016 menurun menjadi 10,86%. Populasi menurun senilai 10,12% di tahun 2017. di tahun 2018, terdapat penurunan 9,82% dibandingkan di tahun 2017. (BPS, 2019).

Berkurangnya penduduk miskin di Indonesia selama periode 2015-2018 tidak terlepas dengan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan termasuk di

bidang ekonomi. Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh keberhasilan dari membangun SDM. Salah satunya rata-rata lama sekolah (pendidikan). Rata-rata lama sekolah mengungkapkan pencapaian pendidikan setiap penduduk. Peningkatan pendidikan ataupun rata-rata lama sekolah di Indonesia termasuk satu dari indikasinya.

Pada tahun 2015, tingkat pendidikan yang diprosikan rata-rata lama sekolah yaitu 7,84 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah di Indonesia yaitu 7,95 tahun di tahun 2016. lalu di Tahun 2017 meningkat senilai 8,10 tahun. lalu di Tahun 2018 tumbuh senilai 8,17 tahun (BPS, 2019). bisa dikatakan bahwa semakin banyak lama sekolah, semakin tinggi pula derajat pendidikan yang dicapai penduduk.

Tingkat pengangguran terbuka juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut di tahun 2015 senilai 6,18 persen. Kemudian, 5,61% pada 2016 Selain itu, menurun 5,50% pada 2017 dan 5,13% pada 2018. (BPS, 2019). Tingkat pengangguran diyakini bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Berkurangnya penduduk miskin di Indonesia selama periode 2015-2020 mengalami keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi. Keberhasilan ekonomi tersebut di pengaruhi adanya pembangunan pada SDM, dimana bisa di dilihat dari pendapatan nasional Indonesia. di tahun 2015 PDB Indonesia senilai Rp. 11.540,8 triliun. Kemudian, di Tahun 2016 PDB Indonesia naik senilai ialah Rp12.406,8 triliun. Selanjutnya, di tahun 2017 PDB Indonesia mengalami kenaikan lagi senilai Rp13.588,8 triliun. di tahun 2018 PDB Indonesia masih mengalami kenaikan senilai Rp14.837,4 triliun (BPS,2019). bisa di lihat pada data tersebut PDB Indonesia periode 2015-2018 mengalami kenaikan pada tiap tahun.

Sama halnya dengan Sumatera Barat, penduduk miskin di Sumatera Barat turun di tahun yang sama. di tahun 2015, terdapat 7,31% hidup dalam kemiskinan di Sumatera Barat. di tahun 2016, turun menjadi 7,09%. Selain itu, persentase penduduk miskin mengalami penurunan senilai 6,87% di tahun 2017. Penduduk yang hidup dalam kemiskinan berkurang senilai 6,65% di tahun 2018 (BPS, 2019).

Berkurangnya penduduk miskin pada periode 2015-2018 berkaitan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pendidikan bisa dijadikan alasan guna mengukur perkembangan pembangunan ekonomi dan kualitas SDM. di Tahun 2015 pendidikan (rata-rata lama sekolah) di Sumatera Barat adalah senilai 8,42 tahun. Selanjutnya di tahun 2016 senilai 8,59 tahun. lalu

pendidikan di tahun 2017 bertambah senilai 8,72 tahun dan di tahun 2018 naik lagi senilai 8,76 (BPS,2019). bisa dilihat pada data tersebut bahwasanya pendidikan tiap tahun mengalami kenaikan.

Selain pendidikan (rata-rata lama sekolah), Tingkat Pengangguran Terbuka dikaitkan dengan penurunan kemiskinan di Sumatera Barat. bila pengangguran berkurang, maka kemiskinan juga akan berkurang. di Tahun 2015 di Sumatera Barat senilai 5,99%. Selain itu mengalami penurunan senilai 5,81% di tahun 2016. lalu terjadi penurunan senilai 5,80% di tahun 2017 dan 5,68% di Tahun 2018. (BPS, 2019). Hal ini terlihat bahwasanya pengangguran terbuka berpengaruh kepada penurunan jumlah penduduk miskin, sebab pengurangan setiap tahun akan menyebabkan turunnya penduduk miskin.

Menurunnya penduduk miskin di Sumatera Barat juga berhubungan dengan keberhasilan ekonomi dilihat dari meningkatnya PDRB Sumatera Barat. Selama periode 2015-2018 PDRB di Sumatera Barat mengalami kenaikan, dimana di Tahun 2015 jumlah PDRB Sumatera Barat senilai Rp. 179.951.980,32. Selanjutnya di tahun 2016 PDRB Sumatera Barat naik senilai Rp.196.099.176,57. di tahun 2017 jumlah PDRB Sumatera Barat Rp 213.893.468,18, lalu tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp. 230.571.985,59 (BPS, 2019).

Demikian pula, di Indonesia dan Sumatera Barat, penduduk miskin di Pesisir Selatan juga menurun antara tahun 2015 dan 2018. di tahun 2015 terdapat 8,46%. Selain itu, penduduk miskin di Tahun 2016 sebesar 7,92%. Penduduk miskin menurun senilai 7,79% di tahun 2017. di tahun 2018, terdapat 7,59%. Dari tahun 2015 hingga 2018, penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan setiap tahun. Penurunan angka kemiskinan di Pesisir Selatan antara tahun 2015 hingga 2018 tidak terlepas dari pencapaian pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor menjadi penyebab turunnya penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan. Faktor-faktor yang menentukan kemiskinan antara lain pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut statistik BPS, angka kemiskinan di Pesisir Selatan masih berada diatas rata-rata provinsi senilai 7,59 persen, namun mengalami penurunan dari 7,97% pada triwulan sebelumnya. Namun, angka provinsi hanya 6,65 persen. Bahkan RPJMD di Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 yang menempatkan angka kemiskinan tahun 2018 senilai 7,18 persen, menargetkan jumlah tersebut.

Menurunnya penduduk miskin tidak hanya bergantung kepada besarnya PDRB ataupun kecilnya tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga perlu memperhatikan pendidikan. di tahun 2015-2019 tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) senilai 8,11 tahun, selanjutnya di tahun 2016 naik selama 8,11 tahun, kemudia di tahun 2017 naik lagi adalah senilai 8.13 tahun dan tahun 2018 adalah senilai 8.14 tahun (BPS, 2019). Tingkat pendidikan ditamatkan pada setiap tahun semakin tinggi, kenaikan tingkat pendidikan akan menaikkan juga peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Maka, apabila seseorang mendapat pekerjaan akan mengeluarkan seseorang tersebut keluar dari kemiskinan.

Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka di pesisir selatan adalah senilai 11,69 persen. Dan di tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka senilai 11,7 persen, di tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka senilai 5.95 persen. Selanjutnya di tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka terlihat senilai 5,85 persen. Penurunan tingkat pengangguran terbuka sering kali di iringi dengan turunnya jumlah penduduk miskin, semakin sedikit orang yang menganggur maka diasumsikan akan mengurangi jumlah penduduk miskin, dikarenakan penurunan tingkat pengangguran terbuka berarti bertambah banyaknya orang yang berkerja dan mendapat penghasilan, dengan didapatkan penghasilan berarti seseorang tersebut bisa mencukupi kebutuhannya dan keluar dari kemiskinan.

Perkembangan ekonomi daerah juga dilihat dari perkembangan PDRB dari satu wilayah. Nilai PDRB bisa juga dilihat dari tingkat pembangunan setiap daerah tersebut, di tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai nilai PDRB senilai 448.154,98 juta rupiah dan naik setiap tahun, dan terakhir di Tahun 2018 nilai PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan senilai 9.470.783,59 juta rupiah Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan terlihat hasil peningkatan yang tinggi setiap tahun. Peningkatan PDB dan PDB satu wilayah ataupun negara juga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Panangrangi, 2012).

Penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi tingkat pendidikan naik tiap tahunnya dan tingkat pengangguran terbuka turun tiap tahunnya, kemudian PDRB naik tiap tahunnya, namun menurut BPS 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan posisi keempat tertinggi di Sumatera Barat. Selanjutnya ada beberapa penelitian yang berbeda, sebagai berikut :

Menurut penelitan Wirawan dan Arka (2015). Dengan memakai teknik analisis regresi linier berganda ditemukan hasil secara parsial pendidikan mempengaruhi jumlah

penduduk miskin yang nilainya kearah negatif dan signifikan. Kemudian pengangguran pengaruh negatif dan signifikan, PDRB mempunyai pengaruh yang positif terhadap penduduk miskin.

Selanjutnya perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Wulantika (2020) penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan data yang digunakan adalah time series. Hasil analisis dalam penelitian ini secara simultan bahwa kemiskinan di pengaruhi variabel PDRB dan variabel jumlah penduduk miskin di Batu Bara. Variable PDRB memiliki berpengaruh negatif namun signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kemudian perbedaan penelitian yang dilakukan Permana dan Arianti (2012) variabel yang digunakan adalah PDRB, Pendidikan, dan Kesehatan. Hasilnya PDRB berpengaruh positif dan signifikan, kemudian tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan.

Berlandaskan beberapa latar belakang masalah yang ditulis oleh peneliti dan temuan penelitian yang berbeda, ditentukan bahwa ada beberapa perbedaan antara pendapat temuan pengaruh variabel pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB terhadap kemiskinan. Maka, peneliti melakukan penelitian tentang masalah ini yang berjudul “Analisis tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2000-2021”

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengkaji pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengkaji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.



### 1.4. Manfaat Penelitian

Tentunya setiap penelitian memberi hasil yang diharap bisa bermanfaat bagi peneliti dan pihak lain yang memerlukannya. Manfaat penelitian ini ialah:

1. Dari sisi keilmuan, diharapkan penelitian ini bisa memberi masukan dan pengembangan kepada pengambil kebijakan, ialah pemerintah pusat dan daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, berupa masukan dan saran untuk dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan guna mendorong pengembangan keilmuan. ekonomi, pembangunan daerah.
2. Memberikan manfaat bagi mahasiswa ataupun masyarakat luas, khususnya yang ingin memperluas pemahaman ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi setiap universitas, dan berkontribusi dalam berpikir kritis.

3. Mampu memberi informasi yang bermanfaat dan baik untuk kemiskinan yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

